

	Halaman
Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	ii
Pernyataan Tanggung Jawab _____	v
I. Ringkasan Laporan Keuangan _____	1
II. Laporan Realisasi Anggaran _____	4
III. Neraca _____	5
IV. Laporan Operasional _____	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas _____	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan _____	8
A. Penjelasan Umum _____	8
A.1. Dasar Hukum _____	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknik Politeknik Negeri Ketapang _____	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan _____	11
A.4. Basis Akuntansi _____	11
A.5. Dasar Pengukuran _____	11
A.6. Kebijakan Akuntansi _____	12
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran _____	23
B.1. Pendapatan _____	23
B.2. Belanja _____	23
B.3. Belanja Pegawai _____	25
B.4. Belanja Barang _____	25
B.2. Belanja Modal _____	26
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca _____	27
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran _____	27
C.2. Kas lainnya dan setara kas _____	27
C.3. Piutang Bukan Pajak _____	27
C.4. Pinyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang tak Tertagih _____	27
C.5. Persediaan _____	28
C.6. Tanah _____	29
C.7. Peralatan dan Mesin _____	29
C.8. Gedung dan Bangunan _____	29

C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30
C.10. Aset Tetap Lainnya	31
C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan	32
C.12. Akumulasi Penyusutan	32
C.13. Aset Tak Berwujud	33
C.14. Uang Muka dari KPPN	33
C.15. Utang Kepada Pihak ketiga	34
C.16. Pendapatan diterima dimuka	34
C.17. Utang jangka pendek lainnya	34
C.18. Ekuitas	34
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2. Beban Pegawai	36
D.3. Beban Persediaan	37
D.4. Beban Barang Jasa	38
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	39
D.9. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	40
D.10. Beban dari kegiatan non operasional lainnya	40
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	41
E.2. Surplus (Defisit) LO	41
E.3. selisih Revaluasi aset tetap	41
E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41
E.5. Transaksi Antar Entitas	41
E.3. Kenaikan / Penurunan Ekuitas	41
E.6. Ekuitas Akhir	41
	F.
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	
F.1. Politeknik Negeri Ketapang	42
F.2.	
Revisi Dipa	42
F.3.	
Tindak Lanjut Hasil Audit BPK	43

F.4. Pengelola Keuangan	44
F.5. Pengungkapan lain-lain	44

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Negeri Ketapang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Ketapang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ketapang, 17 Januari 2020
Direktur,

Endang Kusmana
NIP 196810302001121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangge Sentap - Dalung, Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan

Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813

e-mail : poliketapang@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ketapang, 20 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Endang Kusmana
NIP 196810302001121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.4.526.110.344. atau hanya mencapai 84.43 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.6.199.459.000. yang terdiri dari Rp.4.471.750.000. adalah pendapatan pendidikan, pendapatan Ujian/Seleksi masuk pendidikan sebesar Rp.45.400.000. kemudian sebesar Rp.8.960.000 yang berasal dari pendapatan pendidikan lainnya. Dan terakhir pendapatan lain-lain sebesar Rp.344

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.16.646.817.817. atau mencapai 96.50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.17.250.120.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.129.454.176.692. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.85.768.165. Aset Tetap (neto) sebesar Rp.129.368.408.527. Piutang bukan pajak (neto) sebesar Rp.2.288.500. dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban sebesar Rp.886.317.652. yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.794.986.666 pendapatan diterima dimuka yang berasal pendapatan pendidikan untuk semester ganjil yang dimulai dari bulan september 2018 hingga bulan february 2019. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berasal dari dana pihak ketiga berupa beasiswa yang masuk di rekening bendahara penerimaan dan belum ditarik kemudian disalurkan kepada mahasiswa yang bersangkutan per 31 Desember 2019 sehingga menjadi hutang kepada pihak ketiga sebesar

Rp.60.000.000. belanja barang yang masih harus dibayar yakni beban langganan jasa listrik Rp.18.155.886. dan jasa internet bandwidth, astinet, dan surat kabar sebesar Rp.13.175.100. bulan Desember 2019 yang belum dibayar bendahara pengeluaran per akhir periode karena tagihan dari pihak ketiga terbit pada bulan berikutnya. Dan nilai ekuitas sebesar Rp.128.567.859.040

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.4.461.073.678. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.20.685.379.040 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(16.224.305.362). Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp.25.004.230. dan beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp.25.297.505. sehingga terdapat defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp.(293.275). Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp.0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(16.224.598.637).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.135.741.583.332. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(16.224.598.637) selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp.(3.189.330.000). dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp.119.496.872. ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.12.120.707.473. kemudian kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(7.173.724.292.) sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.128.567.859.040.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		%thdAngg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.199.459.000	4.526.110.344	73,01	3.841.639.144
JUMLAH PENDAPATAN		6.199.459.000	4.526.110.344	73,01	3.841.639.144
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.517.656.000	1.497.993.487	98,70	2.787.810.176
Belanja Barang	B.4	15.045.428.000	14.469.041.828	96,17	11.407.118.342
Belanja Modal	B.5	687.086.000	679.782.502	98,94	1.122.108.980
Jumlah Belanja Operasi		17.250.120.000	16.646.817.817	96,50	15.317.037.498
Pinjaman Dan Hibah					
Belanja Barang	B.6	-	-	#DIV/0!	404.747.129
Belanja Modal	B.7	-	-	#DIV/0!	94.813.727
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	#DIV/0!	499.560.856
JUMLAH BELANJA		17.250.120.000	16.646.817.817	96,50	15.816.598.354

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	160.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	2.500.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	5.860.891	-
Piutang PNBP	C.4	33.750.000	30.750.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	(168.750)	(153.750)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	181.759.353	72.798.000
Jumlah Aset Lancar		383.701.494	103.394.250
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	36.494.874.000	36.494.874.000
Peralatan dan Mesin	C.14	61.561.575.035	61.499.696.735
Gedung dan Bangunan	C.15	27.196.377.200	27.196.377.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	2.511.476.790	2.463.226.790
Aset Tetap Lainnya	C.17	2.446.767.910	2.446.767.910
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	52.953.541.821	52.953.541.821
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(49.081.086.272)	(46.636.695.374)
Jumlah Aset Tetap		134.083.526.484	136.417.789.082
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	1.418.009.174	1.418.009.174
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(1.418.009.174)	(1,418,009,174)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		134.467.227.978	136.521.183.332
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	160.000.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	5.860.891	-
Utang kepada pihak ketiga	C.25	24.100.000	21.200.000
Pendapatan diterima dimuka	C.26	364.233.333	758.400.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		554.194.224	779.600.000
JUMLAH KEWAJIBAN		554.194.224	779.600.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	133.913.033.754	135.741.583.332
JUMLAH EKUITAS		133.913.033.754	135.741.583.332
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		134.467.227.978	136.521.183.332

III. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.461.073.678	3.058.239.144
JUMLAH PENDAPATAN		4.461.073.678	3.058.239.144
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.497.993.487	2.787.810.176
Beban Persediaan	D.3	578.140.375	415.459.630
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.082.877.816	9.084.775.892
Beban Pemeliharaan	D.5	1.076.457.100	790.731.559
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.689.351.117	1.550.687.677
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.760.701.395	5.080.200.245
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(142.250)	(125.000)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		20.685.379.040	19.709.540.179
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.224.305.362)	(16.651.301.035)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	25.004.230	151.370.764
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.297.505	2.433.300
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(293.275)	148.937.464
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.224.598.637)	(16.502.363.571)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.13	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16.224.598.637)	(16.502.363.571)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITASAWAL	E1	135.741.583.332	140.417.356.327
SURPLUS/DEFISIT LO	E2	(16.224.598.637)	(16.650.732.205)
PENYESUAIAN NILAI ASET LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E3	-	-
KOREKSI ASETTETAP	E4	-	-
SELISIH REVALUASI ASETTETAP	E5	(3.189.330.000)	-
KOREKSI NILAI ASETTETAP NON REVALUASI	E6	119.496.872	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		(3.069.833.128)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		12.120.707.473	11.974.959.210
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E7	(7.173.724.292)	(4.675.772.995)
EKUITASAKHIR		128.567.859.040	135.741.583.332

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Keputusan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 272/PMK.05/2015 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/ lembaga;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Profil Satker

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Ketapang

Politeknik Ketapang (POLITAP) didirikan oleh Yayasan Pangeran Iranata Ketapang bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Kesepakatan Bersama Nomor: 03/YPI-KTP/B/02/06 dan 425.1/Ekbangsos-C tanggal 12 Februari 2006 yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:

66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008. Pada tanggal 26 Pebruari 2014 seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang, maka status Kelembagaan Politeknik Ketapang menjadi Politeknik Negeri Ketapang (POLITAP) berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri dan menjadi Satuan Kerja.

Visi Politeknik Negeri Ketapang sebagaimana diatur pada pasal 23 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang adalah *Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional*. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi dan tujuan sebagaimana diatur pada pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri tersebut yaitu :

1. Misi Politap adalah :
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
 - b. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
 - e. membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan
2. Tujuan Politap adalah
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
 - b. menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat;
 - c. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan

- masyarakat;
- d. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
 - e. menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional

Untuk mengimplementasikan visi, misi dan tujuan tersebut, Politeknik Negeri Ketapang telah menyusun Rencana Strategis Politap 2015-2019 dan merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu melalui penentuan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan relevansi, kualitas dan kapasitas layanan akademik
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kemahasiswaan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Institusi
4. Meningkatkan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas SDM
5. Memperkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja.

Salah satu implementasi untuk mewujudkan sasaran kelima *memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja* adalah penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, akurat dan transparan. Politeknik Negeri Ketapang merupakan satuan kerja vertikal dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan akuntansi pemerintah dengan penyajian yang akuntabel, akurat dan transparan guna mendukung penyajian Laporan Keuangan Kementerian sebagai satu kesatuan entitas pelaporan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Negeri Ketapang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Politeknik Negeri Ketapang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Negeri Ketapang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.6. Kebijakan Akuntansi

akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Ketapang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ketapang adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Laporan Operasional

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pendidikan diakui setelah pelaksanaan pendidikan

selesai dilaksanakan pada periode yang bersangkutan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- latar belakang pelaksanaan dan pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang “Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai standar Akuntansi Pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.” Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa

“penilaian kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:

-Tanah

-Gedung dan Bangunan dan

-Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air,

Pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.” Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan, pada paragraf 42 menyatakan bahwa **“Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”**

c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa “jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

-dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

-tanggal efektif penilaian kembali ;

-Jika ada, nama penilai independen;

-Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti

-nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, LKKL harus mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi berupa penilaian kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada CaLK. Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa

survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka nilai tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada Pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- (9) Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- (10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
- Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Realisasi
Pendapatan
Rp.4.526.110.344.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.4.526.110.344. atau mencapai 73.01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.6.199.459.000. Pendapatan Politeknik Negeri Ketapang terdiri dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, dan Pendapatan pendidikan lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.170.359.000	4.471.750.000	72,40
Pendapatan Ujian/Seleksi masuk pendid	29.100.000	45.400.000	156,00
Pendapatan pendidikan lainnya	-	8.960.000	-
Pendapatan lain-lain	-	344	-
Jumlah	6.199.459.000	4.526.110.344	73,01

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp.4.526.110.344. dan Rp.3.841.639.144. terdapat kenaikan 15,2 persen dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat penambahan kelas karena animo mahasiswa yang tinggi untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Ketapang khususnya untuk jurusan Teknik Informatika, Sipil, dan Elektro. kemudian pendapatan Ujian/Seleksi masuk pendidikan TA 2019 berupa formulir pendaftaran dan tes masuk perguruan tinggi.

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp.16.646.817.817

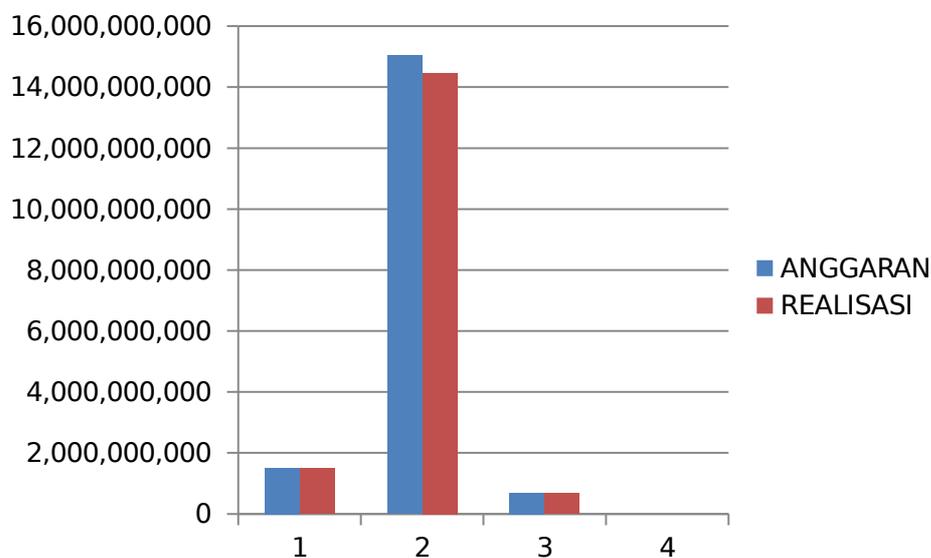
B.2. Belanja

Realisasi belanja Politeknik Negeri Ketapang pada TA 2019 adalah sebesar Rp.16.646.817.817. atau 96.50 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.17.250.120.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	1.517.656.000	1.497.993.487
Belanja Barang	15.045.428.000	14.469.041.828
Belanja Modal	687.036.000	679.782.502
Bantuan Sosial	0	0
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Total Belanja Kotor	17.250.120.000	16.646.817.817

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi perbandingan belanja pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.497.993.487. dan Rp. 2.787.810.853. menurun 46,27 persen dari tahun sebelumnya. Belanja barang TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp.14.469.041.828. dan Rp. 11.407.118.342. mengalami peningkatan 21,17 persen dari tahun sebelumnya. Sementara perbandingan belanja modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.679.782.502 dan Rp. 1.122.108.980. mengalami penurunan 39,41 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai
Rp.1.497.993.487

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Politeknik Negeri Ketapang TA 2019 disandingkan dengan TA 2018 dimana masing-masing sebesar Rp.1.497.993.487. dan Rp.2.787.810.176. terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan dengan TA 2018. dikarenakan pada tahun 2019 Belanja pegawai pembiayaannya sesuai dengan semestinya untuk gaji dan tunjangan cpns dan pns. Sementara pada TA 2018 belanja pegawai masih digunakan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah non pegawai negeri. Dan secara aturan memang sebenarnya pembayaran gaji pegawai non PNS tidak boleh menggunakan akun 51.

Perbandingan Belanja Pegawai 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	717.967.640	172.280.640	19,00
Belanja pembulatan Gaji PNS	16.349	4.216	3,88
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	38.513.564	12.311.712	-
Belanja Tunjangan Anak PNS	9.087.638	3.303.348	
Belanja Tunjangan Struktural PNS	136.225.000	82.250.000	
Belanja Tunjangan Beras PNS	43.234.740	12.456.240	
Belanja Tunjangan Umum PNS	59.185.000	14.060.000	
Beban Tunjangan Profesi Dosen	34.273.200	31.694.400	
Beban Uang Makan PNS	218.558.000	74.244.500	
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	2.228.785.120	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.100.000	12.900.000	
Belanja Tunjangan PPh PNS	0	0	
Belanja Tunjangan lainnya Non PNS	224.388.000	143.520.000	
Belanja Honor uang tetap	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	1.498.549.131	2.787.810.176	-
Pengembalian Belanja Pegawai	555.644	351.500	-
Jumlah Belanja	1.497.993.487	2.787.810.176	-

Belanja Barang
Rp.14.469.041.828.

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang Politeknik Negeri Ketapang TA 2019 disandingkan dengan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.14.469.041.828. dan Rp.11.407.118.342. terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun 2019 seluruh gaji pegawai pemerintahan non pegawai negeri semuanya menggunakan akun 52. Sementara pada tahun 2018 untuk gaji beberapa pegawai pemerintah non pegawai negeri menggunakan akun 51. Realisasi mengenai belanja barang di Politeknik Negeri Ketapang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	7.047.198.688	5.517.876.000	-
Belanja Barang Non Operasional	3.631.465.691	3.108.814.553	-
Belanja Jasa	395.634.091	388.880.282	-
Belanja Pemeliharaan	1.147.083.010	775.256.959	-
Belanja barang persediaan	558.309.231	470.350.000	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.689.351.117	1.550.687.677	-
Jumlah Belanja Kotor	14.469.041.828	11.811.865.471	-
Pengembalian Belanja	-	28.674.880	
Jumlah Belanja	14.469.041.828	11.840.540.351	-

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp.679.782.502.

Realisasi belanja Modal Politeknik Negeri Ketapang TA 2019 disandingkan dengan TA 2018 masing-masing memiliki nilai sebesar Rp.679.782.502 dan Rp.1.216.922.707. pada TA 2019 terdapat penurunan dibandingkan dengan TA 2018. Realisasi mengenai belanja Modal di Politeknik Negeri Ketapang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Peralatan dan Mesin	349.226.400	712.840.707	-
Belanja Gedung dan Bangunan	0	181.582.000	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	240.560.152	152.650.000	
Belanja modal lainnya	89.995.950	169.850.000	
	0	0	
Jumlah Belanja	679.782.502	1.216.922.707	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0. merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. Sisa UP telah disetor ke kas negara per 30 Desember 2019 dengan kode NTPN: 7E3EC3CIE6AH5N59 sebesar Rp. 330.000 (UP PNBPN), dan Rp. 7.641.627. dengan kode NTPN: 9BE081JNEH5OBNIP (UP RM). Sedangkan saldo kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 juga sebesar Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp.60.000.000.

C.2 Kas Lainnya dan setara kas

Kas Lainnya dan setara kas merupakan kas lainnya yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran secara sah. Saldo Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.60.000.000. sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0. Kas lainnya berasal dari saldo di rekening bendahara penerimaan bulan Desember berupa dana Bidikmisi berasal dari Ditjen Belmawa yang proses masuknya terekam di *print out* rekening korang pada tanggal 31 Desember 2019 Jam 17.00 Wib. Sehingga tidak bisa ditarik lagi dari rekening untuk di kosongkan per 31 Desember 2019. dikarenakan jam pelayanan di bank sudah tutup. Sementara pada tahun 2018 tidak ada kas lainnya, karena tidak ada pajak bendahara maupun seperti kasus diatas tersebut dan 31 desember 2018 bersaldo Rp.0.

Piutang Bukan Pajak
Rp.2.300.000.

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.300.000. dan jika disandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.30.750.000. adapun Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Untuk saat ini piutang PNBPN Politeknik Negeri Ketapang hanya bersumber dari Piutang pendidikan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2019	TH 2018
Piutang PNBPN	2.300.000	30.750.000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	2.300.000	30.750.000

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp (11.500)

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(11.500) jika disandingkan dengan nilai penyisihan piutang TA 2018 sebesar Rp(153.750). maka terdapat penurunan jumlah penyisihan piutang di tahun 2019. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	2.300.000	0,50%	11.500
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	2.300.000		11.500
Jumlah	2.300.000		11.500
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.300.000		11.500

Persediaan
Rp.23.479.665,-

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan Politeknik Negeri Ketapang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.23.479.665,-. Sedangkan untuk nilai persediaan pada tahun 2018 sebesar Rp.72.798.000. terdapat penurunan nilai persediaan sebesar Rp.49.318.335. atau 68 persen dari tahun 2018.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	23.479.665	66.163.600
Barang untuk Pemeliharaan	-	585.000
Suku Cadang	-	60.500
Pita Cukai atau Legas	-	-
Bahan Baku	-	5.988.900
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	23.479.665	72.798.000

Sebagai catatan akun Pita, Cukai, Materai dan Leges sudah tidak boleh dipergunakan lagi dalam persediaan. Semua jenis persediaan pada tanggal

pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp.
36.494.874.000,-

C.6 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 36.494.874.000. nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	36.494.874.000
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Koreksi Nilai Tim Penerbit Aset	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	36.494.874.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	36.494.874.000

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Rp. 62.060.754.753,-

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 Rp 62.060.754.753,-. Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	61.499.696.735
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	561.058.018
Transfer Masuk	0
Total Mutasi Tambah	561.058.018
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	62.060.754.753
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(48.666.180.533)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	13.394.574.220

a. Saldo Awal sebesar Rp. 61.499.696.735,- terdapat mutasi tambah sebesar Rp.561.058.018,- dari pembelanjaan Tahun Anggaran 2019. Dan sebesar Rp.125.695.418. pembelian yang menggunakan akun belanja barang.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.24.007.047.200,-

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 24.007.047.200,-. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	27.196.377.200
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Tim Penerbit Aset	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(3.189.330.000)
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	24.007.047.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1.328.723.686)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	22.678.323.514

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

a. Saldo Awal sebesar Rp.27.196.377.200. tidak ada mutasi tambah Tahun Anggaran 2019 baik yang berasal dari pengembangan nilai aset berupa pengembangan bangunan. Menindaklanjuti Nota dinas Nomor: ND-1183/KN.2/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal langkah-langkah proses peningkatan status perbaikan penilaian kembali BMN dari penilaian selesai menjadi LHIP selesai. Sehingga politeknik negeri ketapang harus melakukan revaluasi aset, khusus Gedung dan Bangunan. sementara jika disandingkan dengan nilai aset gedung dan bangunan 31 Desember 2018 sebesar Rp.27.196.377.200. tidak ada perubahan dan masih sama.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.593.326.790. nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp 2.593.326.790*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.463.226.790
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	130.100.000
Total Mutasi Tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	2.593.326.790
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1.282.995.678)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.310.331.112

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa:

a. Saldo Awal sebesar Rp.2.463.226.790. berasal dari Saldo Awal dari Tahun Anggaran 2018 terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2019. Yakni berasal pengembangan jaringan sebesar Rp.48.250.000, dan pengerasan jalan lingkungan kampus sebesar Rp.81.850.000,-

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp.2.536.763.860*

C.10 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.536.763.860. nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.446.767.910
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	89.995.950
Total Mutasi Tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	2.536.763.860
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.536.763.860

Mutasi transaksi penambahan aset tetap lainnya berupa:

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.52.953.541.821*

a. Saldo Awal sebesar Rp.2.446.767.910. berasal dari Saldo Awal Tahun Anggaran 2019 terdapat mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2019. Berupa belanja Buku perpustakaan dan ajar sebesar Rp.89.995.950
Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.52.953.541.821. dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	52.953.541.821
Mutasi tambah:	
Saldo Awal Tahun 2016	
Saldo Awal Semester II	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Nilai KDP	-
Saldo per 31 Desember 2019	52.953.541.821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	52.953.541.821

Rincian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. KDP Politeknik Negeri Ketapang berasal dari gedung Lab dan kuliah terpadu tahun 2015 dan masih menunggu tindak lanjut untuk penyelesaian. Pada tahun 2018 telah dilakukan review kembali dan akan diselesaikan oleh kementerian PUPR. Dan akan dilakukan proses pengerjaan dan lelang pada awal tahun 2020. Akantetapi hingga laporan ini disusun belum ada tanda-tanda dari pihak kementerian PUPR untuk merealisasikan hal tersebut.

Akumulasi Penyusutan

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap
Rp(51.477.453.790)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah Rp. (51.477.453.790) dan saldo akumulasi penyusutan aset tetap 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(46.636.695.374). terdapat peningkatan nilai akumulasi penyusutan dari tahun 2018. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	62.060.754.753	48.666.180.533	13.394.574.220
2	Gedung dan Bangunan	27.196.377.200	1.328.723.686	25.867.653.514
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.593.326.790	1.282.995.678	1.310.331.112
Akumulasi Penyusutan		91.850.458.743	51.277.899.897	40.572.558.846

C.13 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.1.418.009.174

Saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.418.009.174. dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.418.009.174
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	1.418.009.174
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1.418.009.174)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Mutasi transaksi penambahan aset tak berwujud berupa:

a. Saldo Awal sebesar Rp.1.418.009.174. berasal dari Saldo 31 Desember

Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat mutasi tambah kurang selama Tahun Anggaran 2019.

Rincian aset tak berwujud disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Uang Muka dari KPPN
Rp.0*

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0. sedangkan per 31 Desember 2018 juga memiliki saldo yang sama yakni sebesar Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Sisa UP telah disetor ke kas negara per 27 Desember 2018 dengan kode NTPN: 7E3EC3CIE6AH5N59 sebesar Rp. 330.000 (UP PNBPN), dan Rp. 7.641.627. dengan kode NTPN: 9BE081JNEH5OBNIP (UP RM)

*Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp.91.330.986*

C.15 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.91.330.986. dan Rp.21.200.000. pembentuk nilai utang kepada pihak per 31 desember 2019 bersumber dari Beban langganan jasa listrik sebesar Rp.18.155.886. dan jasa Internet sebesar Rp.13.175.100. yakni jasa bulan desember yang sudah digunakan pada bulan tersebut dan masih terutang dan dibayar pada bulan januari 2019. Serta uang dana beasiswa bidik misi sebesar Rp.60.000.000. yang belum diserahkan kepada mahasiswa karena masuknya di rekening bendahara penerimaan per 31 desember 2019 jam 17.00.WIB berdasarkan *print out* rekening koran

*Pendapatan diterima
dimuka Rp.794.986.666*

C.16 Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.794.986.666. dan Rp.758.400.000. pembentuk pendapatan diterima dimuka per 31 desember 2019 bersumber dari

pendapatan biaya pendidikan (425412). Mengingat mahasiswa yang melakukan pembayaran biaya kuliah pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019. Tahun akademik semester ganjil berlangsung bulan september 2018 sampai dengan februari 2019. Sehingga sampai dengan tanggal laporan ini di susun per 31 desember 2019, maka masih ada dua bulan yang masih menjadi hak mahasiswa sebagai pengguna jasa pendidikan. dan nilai sisa dua bulan tersebut dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp.0*

C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0. untuk tahun 2018 tidak ada utang jangka pendek lainnya atau Rp.0. dikarenakan tidak ada utang pajak karena sudah disetor sebelum 31 Desember 2019. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran secara sah. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah akun pasangan dari Kas lainnya dan setara kas yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp.128.567.859.040.*

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.128.567.859.040. sementara ditahun sebelumnya nilai ekuitas per 31 desember 2018 adalah sebesar Rp.135.741.583.332. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.4.461.073.678.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.4.461.073.678. dan disandingkan dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.058.239.144. terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.1.402.834.534. atau 31 persen. Kenaikan terjadi karena bertambahnya jumlah angkatan untuk 5 prodi baru sehingga menambah pendapatan uang pendidikan. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	4.406.713.334	3.008.300.000	-
Pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan	45.400.000	49.500.000	
Pendapatan dari hibah YBDS	-	439.144	
Pendapatan anggaran lain-lain	344		
Pendapatan Pendidikan Lainnya	8.960.000	-	
Jumlah	4.461.073.678	3.058.239.144	-

Pendapatan Pendidikan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pembayaran registrasi mahasiswa. Sementara pendapatan ujian/seleksi masuk merupakan pendapatan dari penerimaan mahasiswa baru. Pendapatan dari hibah yang belum disahkan ialah pengembalian sisa hibah yang telah diberikan oleh Pemda Kabupaten Ketapang. dan pada Politeknik Negeri Ketapang yang disahkan hanya belanjanya saja. Sehingga yang tidak dibelanjakan menjadi sisa dan harus disetor dengan menggunakan akun pendapatan hibah yang belum disahkan. pendapatan pendidikan lainnya adalah pendapatan dari pemanfaatan BMN di lingkungan kampus Politeknik Negeri Ketapang.

Beban Pegawai
Rp.1.497.993.487

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.497.993.487. disandingkan dengan beban pegawai tahun 2018 sebesar Rp.2.787.810.176. maka di tahun 2019 mengalami penurunan beban pegawai sebesar Rp.1.289.816.689. atau 46 persen. penurunan ini dikarenakan beban belanja pegawai non PNS (PPNPN) pada T.A 2018 menggunakan akun 51 sekarang di tahun 2019 sebagian besar sudah menggunakan akun 52 seperti seharusnya. Beban belanja Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Politeknik Negeri Ketapang memiliki staff pengajar dan administrasi yang hampir semuanya belum PNS kecuali posisi tertentu yang

menurut perundang-undangan harus dijabat oleh PNS. Namun pada tahun 2019 ada penerimaan CPNS sehingga ada penambahan jumlah CPNS sebanyak 29 orang terdiri dari 20 orang staff pengajar dan 9 orang tenaga administrasi sehingga total CPNS dan PNS ada 36 orang. Adapun, rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Beban Pegawai 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	717.967.640	172.280.640	
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.705	4.216	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	38.513.564	12.311.712	
Beban Tunjangan Struktural PNS	136.225.000	82.250.000	
Beban Tunjangan Beras PNS	43.234.740	12.456.240	
Beban Tunjangan Umum PNS	58.630.000	14.060.000	
Beban Tunjangan Fungsional PNS	17.100.000	12.900.000	
Beban Tunjangan PPh PNS	0	0	
Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	224.388.000	143.520.000	
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	2.228.785.120	
Beban Uang Makan PNS	218.558.000	74.244.500	
Beban Tunjangan Profesi Dosen	34.273.200	31.694.400	
Beban Tunjangan Anak PNS	9.087.638	3.303.348	-
Jumlah Belanja	1.497.993.487	2.787.810.176	20,58

*Beban Persediaan
Rp.578.140.375.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.578.140.375. dan disandingkan dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.415.459.630. dari nilai tersebut beban persediaan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.162.680.745. atau 39,15 persen. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Politeknik Negeri Ketapang untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	409.247.314	239.612.550	-
Beban Persediaan Bahan Baku	144.979.446	154.809.080	-
Beban Persediaan Pita Cukai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	23.913.615	21.038.000	-
Jumlah Beban Persediaan	578.140.375	415.459.630	39,15

Beban Barang dan
Jasa
Rp.9.084.775.892

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp.9.084.775.892. sementara pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.100.833.447. terdapat peningkatan untuk tahun 2018 dimana peningkatan tersebut sebesar Rp.66.958.007 atau 4,64 persen. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ketapang untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	143.420.996	503.443.069	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.865.771.692	4.929.606.181	-
Beban bahan	490.910.108	293.639.600	-
Beban Honor Output Kegiatan	621.183.000	505.130.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.856.379.991	2.310.560.853	-
Beban Langganan Listrik	216.815.886	173.513.956	-
Beban Langganan daya dan jasa lainnya	166.889.191	152.680.326	-
Beban Langganan Air	0	686.000	-
Beban Sewa	19.960.000	60.000.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	11.830.000	45.090.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Perlatan dan mes	24.323.952	110.425.907	-
Beban Jasa Lainnya	2.100.000	0	-
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional	663.293.000	0	-
Jumlah	11.062.877.816	9.084.775.892	-

Beban
Pemeliharaan
Rp.1.076.457.100

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.076.7.100. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 790.731.559. dari perbandingan tersebut terjadi peningkatan sebesar Rp.285.725.541. atau 36,13 persen. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan Politeknik Negeri Ketapang untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.377.877	210.389.959	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lain	759.185.715	323.409.000	-
Beban Persediaan untuk pemeliharaan	15.713.000	9.370.900	-
Beban Persediaan suku cadang	13.180.508	6.103.700	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.000.000	0	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	241.458.000	-
Jumlah	1.076.457.100	790.731.559	-

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.1.689.351.117

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.689.351.117. sementara untuk tahun 2018 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp.

1.550.687.677. terdapat kenaikan sebesar Rp.138.663.440. atau 8,94 persen dari tahun 2018. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Politeknik Negeri Ketapang untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
belanja perjalanan biasa	1.654.165.917	1.528.847.677	
belanja perjalanan dinas dalam kota	35.185.200	21.840.000	
Jumlah	1.689.351.117	1.550.687.677	8,94

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.4.760.701.395.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.760.701.395. sementara untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.080.200.245. terdapat penurunan beban penyusutan dan amortisasi dari tahun 2018 sebesar Rp.239.441.829. atau 6,28 persen. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Politeknik Negeri Ketapang untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.205.367.107	4.435.398.449	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	519.637.336	613.735.200	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.092.500		
Beban Penyusutan Jaringan	31.604.452	31.066.596	
Jumlah Penyusutan	4.760.701.395	5.080.200.245	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.760.701.395	5.080.200.245	-

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih
Rp.(142.250)

D.8. Beban Penyisihan Piutang tak tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Beban penyisihan piutang tak tertagih tahun 2019 adalah sebesar Rp.(142.250). dan beban penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. (125.000).

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp.25.004.230

D.9. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ialah Pendapatan selain pendapatan yang tidak termasuk kepada penggolongan pendapatan diatas. Pendapatan yang diluar dari kegiatan operasional dan tidak direncanakan atau masuk dalam estimasi pendapatan tahun 2019. Pendapatan untuk 2019 adalah sebesar Rp.25.004.230. dan pendapatan untuk 2018 adalah sebesar Rp. 8.657.530. Rincian pendapatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018

Uraian Pendapatan Non Operasional Lainnya	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Pendapatan dari Hibah YBDS	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	25.004.230	8.657.530	188,81
Jumlah Beban Lain-lain	25.004.230	8.657.530	-

D.10. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ialah beban selain beban yang tidak termasuk kepada penggolongan beban diatas. Beban yang muncul dari kegiatan non operasional tahun 2019. beban untuk 2019 adalah sebesar Rp.25.297.505. dan pendapatan untuk 2018 adalah sebesar Rp. 8.088.700. Rincian beban non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018

Uraian Beban Non Operasional Lainnya	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	25.297.505	8.088.700	212,75
Jumlah Beban Lain-lain	25.297.505	8.088.700	-

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp.25.297.505.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.135.741.583.332
2

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp.135.741.583.332. untuk ekuitas awal tahun 2018 adalah sebesar Rp. 140.417.356.327.

Defisit LO

Rp(16.304.655.658
)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(16.304.655.658.). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus defisit LO untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. (16.650.732.205)

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp.
(3.189.330.000.

E.3 Selisih revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.(3.189.330.000). yang merupakan revaluasi negatif nilai gedung dan bangunan. sedangkan pada 31 Desember 2018 terdapat revaluasi sebesar Rp.0. selisih ini berasal dari penilaian kembali nilai aset tetap. Jika aset yang dinilai bernilai lebih maka bersaldo positif begitu juga sebaliknya.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.119.496.872.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.119.496.872. sedangkan pada 31 desember 2018 terdapat koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp.124.721.350. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar
Entitas

Rp.12.120.707.473.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar *Rp.12.120.707.473.* dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 11.974.959.210.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas Rp.
(7.173.724.292)

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai penurunan ekuitas Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.(7.173.724.292). sementara untuk 31 Desember 2018 kenaikan ekuitas sebesar Rp.(4.675.772.995)

Ekuitas Akhir

Rp.128.567.859.04
0

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.128.567.859.040. sementara untuk Periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 135.741.583.332.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG (042.01.400888)

Pada Tahun Anggaran 2018, Politeknik Negeri Ketapang mendapat DIPA dari Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan nomor SP DIPA-042.01.2.400888/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu sebesar Rp12.648.619.000,00

F.2. REVISI DIPA

Selama Tahun Anggaran 2018, Politeknik Negeri Ketapang melakukan revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Revisi 01 tanggal 03 Mei 2019 : Kenaikan Pagu Anggaran Sebesar : 1.893.258.000
 - 2642 : 7.800.000.000
 - 5741 : 3.771.877.000
 - 5742 : 2.970.000.000
 - Total Pagu : 14.541.887.000
2. Revisi 02 tanggal 28 Juni 2019 : RPD mengalami Deviasi Lebih dari 15 % antara realisasi dengan rencana.
3. Revisi 03 tanggal 27 agustus 2019 : Kenaikan Pagu Anggaran PNBSP sebesar : 3.167.464.000
 - 2642 : 7.800.000.000
 - 5741 : 3.771.877.000
 - 5742 : 6.137.464.000
 - Total Pagu : 17.709.341.000
4. Revisi 04 tanggal 24 September 2019 : RPD mengalami Deviasi Lebih dari 15 % antara realisasi dengan rencana.
5. Revisi 05 tanggal 11 Oktober 2019 : Revisi di lakukan karena pergeseran pagu anggaran dalam satu output
6. Revisi 06 tanggal 10 Desember 2019 : Berdasarkan surat dari kepala biro perencanaan No B/1887/A1.1/PR.03.00/2019 tanggal 11 november 2019 hal permintaan ADK RKA K/L dan data perhitungan kebutuhan belanja pegawai tahun 2019 pada satuan kerja karena pagu alokasi belanja pegawai kemenristekdikti pada tahun 2019 masih terdapat kekurangan sebesar Rp 665.712.235.000.

Sedangkan pada pagu belanja pegawai satuan kerja Politeknik Negeri Ketapang mengalami kelebihan dari Rp 3.771.877.000 menjadi Rp 3.321.656.000 atau kelebihan sebesar Rp 450.221.000,-

7. Revisi 07 tanggal 30 Desember 2019 : Penyelesaian Pagu Minus Belanja Gaji untuk tunjangan Struktural dan Fungsional sebesar Rp 2.700.000

F.3. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Politeknik Negeri Ketapang tidak termasuk dalam uji petik audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk Audit Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 18 November 2019. Kronologis pemeriksaan Audit yang dilakukan irjen dijabarkan sbb:

1. Rapat dibuka oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Ketapang dengan perkenalan kepada masing-masing personal pimpinan Politeknik Negeri Ketapang dilanjutkan dengan personal di unit Keuangan, Satuan Pengawas Internal dan Akademik.
2. Perkenalan dilanjutkan dari para auditor Inspektorat Jenderal
3. Auditor menjelaskan teknis pemeriksaan dan laporan-laporan yang harus dipersiapkan. Audit pada periode ini hanya melaksanakan pemeriksaan untuk penerimaan yang diterima selama periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019.
4. Laporan yang dipersiapkan diantaranya :
 - a. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2019 sampai bulan Oktober 2019
 - b. SK Perbendaharaan tahun 2018 dan 2019
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan
 - d. Laporan keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019
 - e. Laporan PNBP
 - f. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan
 - g. Rekening Koran dan Bukti Setor PNBP
 - h. SK tariff SPP/UKT serta pendapatan PNBP lainnya
 - i. Kontrak yang menghasilkan PNBP
 - j. DIPA/RKA-KL tahun 2018 dan tahun 2019

k. Daftar Jumlah Mahasiswa Per Prodi

5. Rekomendasi: Melengkapi berkas administrasi pengelolaan penerimaan dana PNBPN disertai dengan bukti pengeluaran Tahun Anggaran 2019 yang menggunakan sumber dana PNBPN oleh Tim Evaluasi Itjen Kemenristekdikti pada Politeknik Negeri Ketapang.

F.4. PENGELOLA KEUANGAN

Pejabat perbendaharaan Politeknik Negeri Ketapang ditetapkan tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2019, untuk pejabat perbendaharaan lainnya yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai, Direktur telah menerbitkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Direktur nomor 006/PL39/KP/2019 tentang pengelola keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi negeri baru yang belum memiliki pegawai yang kompeten dibidangnya sehingga pengelolaan keuangan dilakukan melalui peminjaman pegawai dari Pemerintah Daerah,
2. Politeknik Negeri Ketapang masih belum mampu melakukan pengoptimalan aset secara maksimal agar menjadi pendapatan bukan pajak.